

PERAN SEKRETARIAT BERSAMA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PAITUA UNTUK KESEJAHTERAAN LANSIA DI KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Zefanya Victor Lobat

Npp. 32.1123

Asdaf Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: zefanyavictorlobat@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Dra. Roslianah, M.Pd

ABSTRACT

Problem Statement (kesenjangan penelitian) : *The high number of elderly people in the West Papua Province is 24,759 elderly people who are divided into each district/city, Sorong Regency itself recorded that during 2023-2024 there were 1,485 elderly people who received benefits from the Paitua Program so that in order to guarantee the survival of the elderly and welfare of the elderly, the local government is implementing the Paitua Program. The Paitua program is an old-age protection program launched by the West Papua government to provide social security for the elderly aged 65 years and over. This program aims to improve the welfare of the elderly by providing cash assistance of IDR 250,000 per month, which is channeled directly to the beneficiary's account through financial institutions or banks. Purpose :* this study was to determine and describe the role of the Joint Secretariat in the implementation of the Paitua Program for Elderly Welfare in Sorong Regency, Southwest Papua Province and to describe the supporting factors and inhibiting factors of the role of the Joint Secretariat in the implementation of the Paitua Program for Elderly Welfare in Sorong Regency, Southwest Papua Province. The research **method** : used is qualitative with a descriptive approach. This study focuses on the role of local government through the joint secretariat in implementing the paitua program in Sorong Regency. Data collection techniques use interviews, observations, and documentation. While the data analysis techniques used in this study are data reduction, data presentation and drawing conclusions. Based on the research **results** : the role of the Joint Secretariat in implementing the Paitua Program for the welfare of the elderly in Sorong Regency, Southwest Papua Province has generally gone well. However, of course, it cannot be separated from several obstacles such as delays in fund distribution, limited information on the paitua program, and administrative obstacles. The researcher provides **conclusion** : for the Joint Secretariat Team such as improving the verification process, program socialization, improving the ongoing monitoring and evaluation process and improving cooperation between related agencies in implementing the paitua program in Sorong Regency.

Keywords: Role, Joint Secretariat Team, Paitua Program, Elderly Welfare, Sorong Regency

ABSTRAK

Permasalahan (kesenjangan penelitian) : Tingginya jumlah lansia di Provinsi Papua Barat Daya sebanyak 24. 759 lansia yang terbagi dimasing-masing kabupaten/kota, kabupaten sorong sendiri tercatat selama tahun 2023-2024 lansia sebanyak 1.485 penerima manfaat Program Paitua sehingga untuk menjamin kelangsungan hidup lansia dan kesejahteraan lansia, pemerintah daerah melaksanakan Program Paitua. Program Paitua adalah program perlindungan hari tua yang diluncurkan oleh pemerintah Papua Barat Daya untuk memberikan jaminan sosial bagi lansia yang berusia 65 tahun ke atas. Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan lansia melalui pemberian bantuan tunai sebesar Rp. 250.000 per bulan, yang disalurkan langsung ke rekening penerima manfaat melalui lembaga keuangan atau perbankan. **Tujuan** dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Peran Sekretariat Bersama dalam pelaksanaan Program Paitua untuk Kesejahteraan Lansia di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya dan mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat Peran Sekretariat Bersama dalam pelaksanaan Program Paitua untuk kesejahteraan lansia di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya. **Metode** : penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini berfokus pada peran pemerintah daerah oleh Sekretariat Bersama dalam pelaksanaan Program Paitua di Kabupaten Sorong. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan **hasil penelitian** : Peran Sekretariat Bersama dalam pelaksanaan Program Paitua untuk kesejahteraan lansia di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya secara umum sudah berjalan baik. Namun, tentu tidak lepas dari beberapa kendala seperti, Keterlambatan Penyaluran Dana, Keterbatasan Informasi Program Paitua, dan Kendala Administrasi. Penulis memberikan **kesimpulan** : bagi Tim Sekretariat Bersama seperti, Peningkatan Proses Verifikasi, Sosialisasi Program, Peningkatan Proses Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan dan Peningkatan Kerja Sama Antar Instansi terkait dalam pelaksanaan Program Paitua di Kabupaten Sorong.

Kata Kunci: Peran, Tim Sekretariat Bersama, Program Paitua, Kesejahteraan Lansia, Kabupaten Sorong

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam melaksanakan program prioritas strategis bersama, yaitu Program Perlindungan Hari Tua (PAITUA), pemerintah daerah bekerja sama melalui Sekretariat Bersama Kabupaten/Kota. Sekretariat ini berfungsi sebagai tim pelaksana yang memiliki peran penting dalam mendukung Gubernur Papua Barat Daya untuk melaksanakan Program Paitua di setiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Barat Daya. *This is conducted through various public services, including government organizations, particularly educational institutions, healthcare, and economic organs. The focus of this phase is promoting community service* (Labolo M, Rohmansyah H, & Rumbekwan M, 2020). Melalui Sekretariat Bersama, program ini dirancang untuk menyalurkan bantuan kepv ada penerima manfaat, yaitu lanjut usia (lansia) berusia 65

tahun ke atas, dengan tujuan untuk menjamin kelangsungan hidup mereka. lansia di Indonesia didominasi oleh kelompok umur 60-69 tahun (lansia muda) yang persentasenya mencapai 5,65% dari penduduk Indonesia, sisanya diisi oleh kelompok umur 70-79 tahun (lansia madya) dan 80 ke atas (lansia tua) (Putri, D. A, 2019).

Salah satu program unggulan dalam Strategi Bersama adalah Program Perlindungan Hari Tua (PAITUA). Strategi pembangunan yang berpusat pada rakyat, memiliki tujuan akhir untuk memperbaiki kualitas hidup seluruh rakyat, dengan aspirasi-aspirasi dan harapan individu dan kolektif, dalam konsep tradisi budaya dan kebiasaan-kebiasaan mereka yang sedang berlaku (Hamid, H. 2018). Program ini dirancang secara khusus untuk memberikan perlindungan dan jaminan hari tua bagi masyarakat Papua Barat Daya yang berusia 65 tahun ke atas. Tujuan utama dari Program Paitua adalah meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama daya beli para lansia, dengan sasaran penting untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Papua Barat Daya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua, program JHT adalah manfaat uang tunai yang diberikan ketika peserta memasuki usia tertentu, tidak ingin bekerja lagi, cacat total tetap sehingga tidak mampu bekerja kembali atau meninggal dunia dan akan diberikan sampai batas waktu tertentu setelah kepesertaan mencapai minimal 10 (sepuluh) tahun. Pane (2019 : 2).

Pelaksanaan Program Paitua berlandaskan pada Peraturan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 8 Tahun 2024, yang merupakan revisi dari Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2023 mengenai Program Perlindungan Hari Tua. Peraturan ini menjadi dasar bagi penyelenggaraan Program Paitua di Provinsi Papua Barat Daya, khususnya di Kabupaten Sorong. Dalam Pasal 1 Ayat 4, dijelaskan bahwa Program Perlindungan Hari Tua, yang selanjutnya dikenal sebagai Program Paitua, merupakan salah satu prioritas program strategis di Provinsi Papua Barat Daya. Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada para lanjut usia, dengan pendanaan yang bersumber dari dana otonomi khusus.

Program Paitua diluncurkan dengan tujuan untuk memberikan bantuan tunai kepada orang tua lanjut usia. Prosesnya dimulai dengan pendataan calon penerima manfaat di setiap Kabupaten dan Kota. Gubernur dan Bupati/Walikota di Papua Barat Daya telah sepakat mengenai besaran bantuan, yang ditetapkan sebesar Rp. 250. 000 per bulan untuk setiap orang. Dari total tersebut, Rp. 150. 000 bersumber dari anggaran Provinsi, sementara Rp. 100. 000 ditanggung oleh anggaran Kabupaten/Kota. Dengan demikian, Program Paitua menjadi salah satu program prioritas strategis bersama (PPSB), yang mewajibkan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyiapkan anggarannya secara terencana. (<https://infopublik.id>. Paitua Program Prioritas Gubernur Papua Barat Daya Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berusia Lanjut. Kamis, 7 September 2023).

Untuk mempercepat proses implementasi, Provinsi Papua Barat Daya telah membentuk Sekretariat Bersama (Sekber) di tingkat provinsi serta kabupaten/kota.

Sekretariat Bersama ini melibatkan Bapperida dalam pelaksanaan Program Paitua di seluruh wilayah tersebut. Kehadiran Tim Sekber diharapkan dapat memberikan dukungan yang signifikan kepada Bapperida serta Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya dan Kabupaten/Kota dalam menjalankan Program Paitua. Dukungan ini mencakup pendataan, penyediaan dana, penyaluran bantuan kepada penerima manfaat, serta dukungan untuk kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu tim sekretariat bersama juga melibatkan masyarakat lansia untuk berpartisipasi sehingga lansia tidak hanya menerima bantuan program paituanya saja melainkan juga mengerti dan ikut mengambil peran membantu sekretariat bersama Kabupaten Sorong. Menurut Putra, D. P. et.al. dalam Davis dan Newstrom, (1989) menyebutkan bahwa salah satu esensi dari partisipasi adalah keterlibatan yang berarti adanya keterlibatan mental dan emosional dibanding hanya aktivitas fisik, sehingga dengan itu maka partisipasi secara sukarela lebih jelas dibanding mobilisasi.

1.2 Kesejangan Masalah Yang Diambil (GAP Penelitian)

Penulis berfokus pada permasalahan kesejahteraan lansia di Kabupaten Sorong yang belum diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong dalam menjamin kelangsungan hidup masyarakat lansia di Kabupaten Sorong, sementara itu dalam meningkatkan kesejahteraan lansia pemerintah daerah mempunyai program unggulan yaitu Program Perlindungan Hari Tua (PAITUA). Program paitua adalah program peningkatan kesejahteraan lansia yang dilaksanakan oleh tim sekretariat bersama dengan bantuan penyaluran dana tunai kepada lansia sebesar Rp. Rp. 250. 000 per bulan untuk setiap orang. Dari total tersebut, Rp. 150. 000 bersumber dari anggaran Provinsi, sementara Rp. 100. 000 ditanggung oleh anggaran Kabupaten/Kota.

Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kesejahteraan lansia di Kabupaten Sorong banyak dari lansia yang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berjualan dan mengharapkan dana desa untuk membeli kebutuhan pokok seperti makan dan minum, Namun tidak hanya disitu dengan berjualan dan dana desa belum mampu menciptakan kesejahteraan lansia dengan begitu Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong meluncurkan program paitua yang berfokus pada penyaluran dana bantuan tunai kepada lansia untuk memenuhi kebutuhan mereka. peran Sekretariat Bersama dalam pelaksanaan Program Paitua di Kabupaten Sorong yaitu, keterlambatan penyaluran dana, keterbatasan akses informasi, dan kendala administratif. Permasalahan diatas merupakan beberapa kendala bagi Sekretariat Bersama dalam pelaksanaan Program Paitua di Kabupaten Sorong dan juga menjadi faktor penghambat peran Sekretariat Bersama Kabupaten Sorong.

1.3 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu ini peneliti mengambil beberapa penelitian yang sejatinya mempunyai perbedaan dan persamaan dalam konsep peran suatu dinas dan kesejahteraan lansia. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus dan lokus, Namun mempunyai persamaan yaitu metode peneltian dan jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti sebagai acuan dalam mengumpulkan dan mengelolah data. Penelitian oleh (Siti Nuraeni, Ike Rachmawati, & Tuah Nur, 2022) mengenai Peran Dinas Sosial dalam

Penyaluran Program Sembako di Kabupaten Sukabumi mengungkapkan bahwa peran Dinas Sosial dalam distribusi program sembako telah berjalan dengan baik dalam aspek fasilitasi, representasi, dan teknis. Namun, peran edukatif belum maksimal, terlihat dari kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penelitian oleh Wulandari (2019) mengenai Peran Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dalam Pelayanan Kehidupan Sosial Ekonomi Lanjut Usia. Panti ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan lansia, terutama mereka yang terlantar atau berasal dari keluarga tidak mampu. Darmayanti dan Lelepadang, (2020) hubungan positif antara interaksi sosial dan kualitas hidup lansia. Hasil dari penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa interaksi sosial yang baik berkontribusi positif terhadap kualitas hidup lansia. Agustine, Y. F. (2018) mengungkapkan bahwa pemberian Bantuan Sosial Tunai (BST) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas hidup lansia di Kelurahan Wonokromo, Surabaya. Program BST efektif dalam meningkatkan kesejahteraan lansia, terutama dalam aspek sosial dan ekonomi. Dengan demikian, program ini dapat menjadi salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup kelompok lansia yang rentan secara ekonomi. Rahayu & Vita Putri. (2018) mengungkapkan bahwa Dinas Sosial Kota Surabaya melalui UPTD Griya Wredha Jambangan telah menjalankan perannya secara efektif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial lansia.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni peran Sekretariat Bersama dalam pelaksanaan program paitua untuk kesejahteraan lansia di Kabupaten Sorong. Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status). Ketika seseorang menjalankan hak dan tanggung jawab sesuai dengan kedudukannya, maka ia sedang menjalankan suatu peran (Soejono Soekanto, 2002). Dengan adanya program paitua ini lansia dapat terbantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang memiliki persamaan dengan penelitian (Siti Nuraeni, Ike Rachmawati & Tuah Nur, 2002). (Wulandari, 2019). (Rahayu dan Vita Putri, 2018). Sedangkan memiliki perbedaan dengan penelitian (Darmayanti & Lelepadang, 2020). dan (Agustine, Y. F. , 2018). Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari Teori peran menurut Ife & Tesoriero (2016) menyatakan bahwa: Berbagai peran community worker telah dikelompokkan ke dalam empat golongan, yakni peran memfasilitasi (*facilitative roles*), peran mendidik (*educational roles*), peran representasi (*representational roles*) dan peran teknis (*technical roles*).

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai Peran Sekretariat Bersama Dalam Pelaksanaan Program Paitua Untuk Kesejahteraan Lansia di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Noor (2011:34) penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. dan menganalisis data data melalui Model Miles and Huberman (1992) yaitu : *data collection, data reduction, data display* dan *data conclusions drawing*. Dalam metode penelitian kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fenomena sosial berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti. Tujuan utamanya adalah untuk memahami dan menggambarkan realitas sosial sebagaimana adanya, dengan menekankan pada makna, nilai, dan interpretasi subjektif dari para partisipan.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan data kualitatif, Menurut Murdiyanto (2020:40), Informan merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Ia berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal. penulis melakukan wawancara secara langsung dan mendalam terhadap 9 orang informan yang terdiri dari Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sorong, Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sorong, Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Sorong, Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia Baperlitbang Kabupaten Sorong, Kepala Administrator Data Base Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong, Kepala Distrik Aimas, Kepala Distrik Wemak, Staf Dinas Sosial Kabupaten Sorong, dan BRI sebagai Bank penyalur. Adapun analisisnya menggunakan teori peran menurut Ife & Tesoriero (2016) yang menyatakan bahwa peran dapat dilaksanakan pada empat tahap yaitu, fasilitas, edukasi, representasi dan teknik.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis Peran Sekretariat Bersama Dalam Pelaksanaan Program Paitua Untuk Kesejahteraan Lansia di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya, dimana melalui program paitua ini lansia dapat menjamin kehidupan sehari-hari mereka. Arsyad (2023) berpendapat bahwa pemerintah perlu merancang program dan kebijakan yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Penelitian dengan teori peran Ife dan Tesoriero (2016) yang dapat dilihat dari peran fasilitas, edukasi, representasi dan teknik yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis peran Sekretariat Bersama dalam pelaksanaan program paitua di Kabupaten Sorong. Adapun kolaborasi yang dilakukan oleh tim sekretarita bersama dalam pelaksanaan program paitua dengan begitu dapat berjalan dengan baik karena dengan kolaborasi terdapat keterampilan, ilmu dan pengetahuan yang dibagikan dalam tim. Kusworo et. al. (2021: 233) menyebutkan bahwa "*To build the dynamics of collaboration, face-to-face*

meetings among various stakeholders can be merged into a single commitment and mutual agreement. If this occurs, the decisions will become a shared responsibility, necessitating efforts to combine diverse resources, information, and knowledge into joint action". Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Peran Fasilitas

Dalam hal ini peran Tim Sekber Kabupaten Sorong diharapkan mampu menjadi fasilitator dalam melaksanakan Program Paitua kepada masyarakat lansia melalui beberapa indikator yaitu; animasi sosial, mediasi dan negosiasi, pemanfaatan sumber daya dan fasilitator kelompok. Animasi sosial pada dimensi fasilitas ini yaitu; memberikan semangat dan motivasi kepada masyarakat. Tim Sekber Kabupaten Sorong dalam pelaksanaan Program Paitua kepada masyarakat lansia di Kabupaten Sorong terkait dengan indikator animasi sosial selalu memberikan semangat dan motivasi kepada masyarakat lansia yaitu dengan adanya Program Paitua ini lansia di Kabupaten Sorong yang menerima bantuan Program Paitua ini dapat dijadikan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup lansia. Modal sosial lebih menekankan pada potensi kelompok dan pola-pola hubungan antara individu dalam suatu kelompok dan antar kelompok dengan ruang perhatian pada jaringan sosial, norma, nilai, dan kepercayaan antara sesama yang lahir dari anggotakelompok dan menjadi norma kelompok Faisal, M. (2017).

Dalam pelaksanaan Program Paitua di Kabupaten Sorong seringkali dihadapkan dengan berbagai kesalahan teknis dilapangan antara Tim Sekber Kabupaten Sorong dengan kepala distrik, masyarakat lansia dengan kepala distrik dan masyarakat dengan bank penyalur dalam masalah pendataan, verifikasi dan penyaluran yang seringkali terjadi kesalahan, oleh karena itu perlu adanya mediasi dan negosiasi daripada Tim Sekber Kabupaten Sorong untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

Pada indikator ini pemanfaatan sumber daya yang menunjang kondisi ekonomi lansia dapat diartikan sebagai pengoptimalan sumber daya yang ada secara efisien. menurut Umar (2017:19) Kebutuhan ekonomi, terutama bagi lansia yang tidak mampu baik lansia potensial maupun lansia tidak potensial, sehingga perlu dibantu dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemanfaatan sumber daya yang dioptimalkan oleh Tim Sekber Kabupaten Sorong digunakan untuk mendukung pelaksanaan Program Paitua yaitu; anggaran yang berasal dari kabupaten sebesar 100.000, pemanfaatan kantor dinas sosial sebagai tempat rapat Program Paitua di Kabupaten Sorong, anggota Tim Sekber sebagai pendukung atau secara umum sumber daya manusia dan sarana prasarana sudah dioptimalkan dengan baik oleh Tim Sekber Kabupaten Sorong.

3.2. Peran Edukasi

Dimensi edukasi dalam teori peran dapat diartikan sebagai peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat. Dalam dimensi edukasi ini

terdapat beberapa indikator yang menjadi acuan bagi Tim Sekber Kabupaten Sorong dalam pelaksanaan Program Paitua. Indikator-indikator tersebut yaitu; memberikan informasi, peningkatan kesadaran masyarakat dan pelatihan. Tim Sekber Kabupaten Sorong pada pelaksanaannya berperan aktif dalam memberikan informasi Program Paitua kepada masyarakat lansia di Kabupaten Sorong agar dipahami manfaat dan kegunaan Program Paitua untuk dimanfaatkan dengan baik, menyampaikan kepada masyarakat bahwa adanya Program Paitua ini dapat menjamin kelangsungan hidup lansia di Kabupaten Sorong.

Tim Sekber Kabupaten Sorong dengan berbagai peran yang dilaksanakan diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat lansia terkait dengan adanya Program Paitua yang memberi manfaat secara ekonomis dan sosial. Tim Sekber Kabupaten Sorong mampu menyakinkan kepada lansia di Kabupaten Sorong bahwa Program Paitua bukanlah bantuan semata berupa uang namun, mampu menciptakan kesejahteraan bagi lansia jika dimanfaatkan bantuan Program Paitua tersebut dengan baik.

3.3. Peran Representasi

Dimensi representasi ini dalam teori peran diartikan sebagai perwakilan individu atau kelompok tertentu dalam masyarakat dengan tujuan membantu masyarakat. Dimensi representasi sendiri memiliki indikator yang dipakai untuk melihat peran Tim Sekber Kabupaten Sorong dalam pelaksanaan Program Paitua, indikator itu sendiri antara lain; advokasi, hubungan masyarakat dan jaringan kerja. Tim Sekber Kabupaten Sorong sendiri hadir sebagai representasi pemerintah daerah Kabupaten Sorong dalam pelaksanaan Program Paitua di Kabupaten Sorong. Indikator advokasi dalam dimensi representasi dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian ketika terjadi ketidaksesuaian/kesalahan, hak lansia harus diperjuangkan dalam mendapatkan bantuan program paitua. Tim Sekber Kabupaten Sorong sendiri merupakan representasi pemerintah daerah Kabupaten Sorong dalam pelaksanaan Program Paitua yang mampu dapat memperjuangkan. Tim Sekber Kabupaten Sorong mempunyai jaringan kerja sendiri baik itu jaringan kerja secara internal dan secara eksternal. Jaringan kerja menjadi indikator penting bagi Tim Sekber karena menangani lansia penerima manfaat Program Paitua di 30 distrik di Kabupaten Sorong yang berbeda-beda dan secara geografis sangatlah jauh untuk di jangkau maka jaringan kerja menjadi indikator penting untuk menciptakan konektivitas antar pemangku yang terlibat dalam pelaksanaan Program Paitua di Kabupaten Sorong.

3.4. Peran Teknik

Pada dimensi teknik dalam teori peran mengacu pada keterampilan teknis yang dapat digunakan untuk mengelolah sumber daya yang ada. Dimensi teknik sendiri mempunyai indikator yang dapat dijadikan acuan untuk melihat sejauh mana peran seseorang atau badan/tim dalam keterampilan teknis, indikator tersebut yaitu; pengumpulan dan analisis data dan penggunaan komputer.

Tim Sekber Kabupaten Sorong dalam pengolahan data tentu perlu keterampilan teknis yang dilakukan secara elektrnonik/digital untuk mendukung

efisiensi dan efektivitas kerja Tim Sekber dalam mengelolah pendataan, verifikasi dan penyaluran kepada lansia penerima manfaat Program Paitua. Berikut indikator yang dipakai untuk melihat sejauh mana keterampilan teknis oleh Tim Sekber kabupaten sorong. Dalam pengumpulan data dan analisis data diperlukan keterampilan teknis yang baik agar dapat menghasilkan data yang valid. Indikator pengumpulan data dan analisis data menjadi penting bagi Tim Sekber karena berkaitan dengan pengelolaan, verifikasi dan analisis data Program Paitua, Tim Sekber Kabupaten Sorong dalam menentukan calon penerimaan Program Paitua biasanya dilakukan dengan pendataan lansia di Kabupaten Sorong yang dilakukan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sorong kemudia di serahkan kepada masing-masing distrik sesuai tempat tinggal lansia, kemudian diverifikasi dilapangan oleh kepala distrik terkait lansia yang memenuhi kriteria selanjutnya diserahkan kepada dinas sosial untuk dilakukan pendataan ulang secara valid yang kemudian diserahkan kepada Bupati Sorong untuk dikeluarkan surat keputusan Bupati terkait calon penerima manfaat Program Paitua di Kabupaten Sorong.

Tim Sekber Kabupaten Sorong dalam mengelolah data lansia secara umum sudah menggunakan komputer sebagai sarana prasarana pendukung Program Paitua bagi lansia baik, pendataan, verifikasi dan penyaluran. Namun, pendataan dan verifikasi di lapangan masih belum dilakukan dengan penggunaan komputer oleh beberapa kepala distrik karena keterbatasan sarana prasarana oleh sebab itu dilakukan secara manual.

4.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam pelaksanaannya program paitua di Kabupaten Sorong dilaksanakan oleh tim sekretariat bersama kabupaten sorong yang ditunjuk oleh Bupati Sorong melalui Keputusan Bupati Sorong Nomor 400 / Kep. 132A / VII / Tahun 2023 tentang Susunan Tim Sekretariat Bersama Program Perlindungan Hari Tua, sebagai bentuk representasi pemerintah daerah dalam melaksanakan Program Paitua sehingga dengan adanya pembentuk Tim Sekber Kabupaten Sorong dapat mewakili pemerintah daerah Kabupaten Sorong dalam pelaksanaan Program Paitua sesuai kedudukan dalam tim untuk dilaksanakan.

Tim Sekretariat Bersama berperan penting dalam pelaksanaan program paitua di Kabupaten Sorong yang dilakukan dalam bentuk pendataan, verifikasi dan penyaluran kepada lansia. Pada pelaksanaannya tim sekretariat bersama merupakan tim yang disusun dengan berbagai organisasi perangkat daerah didalamnya yang mempunyai latar belakang dinas dan pengetahuan yang optimal dalam pelaksanaan program paitua. Program BST merupakan program bantuan yang disalurkan untuk masyarakat kategori KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dalam bentuk nominal tunai. Adapun tujuan program BST yaitu: 1) membantu masyarakat miskin dalam mencukupi kebutuhan pangan dan kebutuhan hidup, 2) menjaga stabilitas kesejahteraan masyarakat miskin, 3) bentuk solidaritas dan tanggung jawab pemerintah dalam menumpas kesulitan hidup masyarakat miskin. Program paitua juga merupakan salah satu program BTS kepada lansia di Kabupaten Sorong (Agustine, Y. F. 2018)

Layaknya dengan peran dinas lainnya dalam pelaksanaan program unggulan/strategis yang dimiliki, peran Tim Sekretariat Bersama dalam pelaksanaan program paitua di Kabupaten Sorong terdapat beberapa faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan program paitua yakni; faktor penghambat adalah keterlambatan penyaluran dana, kendala administrasi, dan keterbatasan akses informasi. Sedangkan faktor pendukung pelaksanaan program paitua adalah adanya dukungan pemerintah berupa keputusan bupati tentang susunan organisasi dan kedudukan Tim Sekber Kabupaten Sorong. *Kedua*, proses verifikasi yang komprehensif dan *Ketiga*, transparansi penyaluran dana.

Adanya peran tim sekretariat bersama ini diharapkan pelaksanaan program paitua dapat dirasakan oleh semua lansia yang ada di kabupaten sorong, artinya bahwa setiap pendataan, verifikasi dan penyaluran program paitua ini benar-benar tepat sasaran dan mampu memberikan manfaat kepada lansia untuk menjamin kehidupan sehari-hari mereka dengan bantuan sebesar Rp. 250.000 perorang. Peran Sekretariat Bersama dalam pelaksanaan program paitua untuk kesejahteraan lansia cukup memberikan dampak yang signifikan kepada lansia dengan bantuan dana tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kesejahteraan lansia meliputi beberapa indikator, diantaranya lansia dapat memenuhi kebutuhan mereka, independen secara finansial, mampu mengurus diri mereka secara mandiri, kondisi kesehatan baik, hidup di lingkungan yang nyaman, memiliki aktivitas yang beragam, dan secara spiritual semakin mantap pada keyakinannya (Djamhari, E. A., Ramdlaningrum, H., Layyinah, A., Chrisnahutama, A., & Prasetya, D., 2021).

Dengan adanya bantuan tersebut lansia di Kabupaten Sorong dapat terbantu untuk memenuhi kebutuhan pokok dan disamping itu juga dapat digunakan untuk membuka usaha kecil-kecilan.

4.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat terhadap pelaksanaan program paitua di Kabupaten Sorong yaitu belum ada aturan yang mengatur mengenai ahli waris penerima bantuan program paitua ketika terdapat penerima yang telah meninggal sehingga seharusnya ada ahli waris atau tidak untuk menerima bantuan program paitua tersebut. Minimnya partisipasi lansia sehingga diperlukan partisipasi agar lansia dan Sekretariat Bersama Kabupaten Sorong dapat bersinergi dengan baik. Partisipasi sendiri tidak hanya melihat keikutsertaan masyarakat didalam pembangunan akan tetapi makna terdalam partisipasi adalah voice, akses dan kontrol masyarakat terhadap pemerintahan dan pembangunan yang mempengaruhi kehidupannya sehari-hari.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa peran sekretariat bersama dalam pelaksanaan program paitua di Kabupaten Sorong sudah berjalan dengan baik karena terdapat

dinas-dinas yang memiliki peran sesuai tugas yang dimiliki untuk membantu pemerintah daerah Kabupaten Sorong dalam pelaksanaan program paitua dan juga penulis melihat peran dari sekretariat bersama ini dengan peran fasilitas, peran edukasi, peran representasi, dan peran teknik ini sudah berjalan dengan baik dalam hal pendataan, verifikasi dan penyaluran. Rahayu dan Vita Putri (2018) mengungkapkan bahwa Dinas Sosial menjalankan perannya secara efektif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial lansia dengan mempertimbangkan kualitas hidup lansia. Namun, terdapat sedikit kendala dalam pelaksanaan program paitua seperti kendala administrasi, kurangnya informasi dan keterlambatan penyaluran dana.

Dengan adanya bantuan program paitua di Kabupaten Sorong sekiranya lansia dapat mempertahankan kualitas hidup mereka dengan baik, artinya lansia dapat memenuhi kebutuhan mereka untuk bertahan hidup. Kualitas hidup seseorang merupakan fenomena yang multidimensional. Betapa pentingnya berbagai dimensi tersebut tanpa melakukan evaluasi sulit menentukan dimensi mana yang penting dari kualitas hidup seseorang. Oleh karena itu bantuan program paitua ini dapat memberikan jaminan bagi kualitas hidup lansia di Kabupaten Sorong (Budiono, Nugrahadi Dwi Pasca & Rivai, A, 2021).

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan jangkauan tempat penelitian. Penelitian juga dilakukan pada beberapa organisasi perangkat daerah seperti Dinas Sosial dan Dukcapil Serta Distrik Aimas.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan peran sekretariat bersama dalam pelaksanaan program paitua untuk kesejahteraan lansia di Kabupaten Sorong untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih terutama ditunjukkan kepada tim sekretariat bersama kabupaten sorong yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Agustine, Y. F. (2018). *Pengaruh Pemberian Program Bantuan Sosial Tunai Terhadap Derajat Kualitas Hidup Lanjut Usia*. Jurnal Paradigma, 11(1), 16-32. <https://ejournal.unesa.ac.id/index>.

Arsyad, A. (2023). *Politik anggaran: Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*. Palita: Journal of Social Religion Research, 8(2), 185–204. <https://doi.org/10.1234/palita.v8i2.12345>

Budiono, Nugrahadi Dwi Pasca & Rivai, A. (2021). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hidup Lansia*. Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada, 10(2), 371-379. <https://dx.doi.org/10.35816/jiskh.v10i2.62>.

- Davis, K. & Newstorm, J.W. (1989). *Human Behavior at Work, Organizational Behavior (Eight Edition)*. New York: McGraw Hill Book Company.
- Damayanti, M., Jeddawi, M., Arsyad, R., & Sahyana, Y. (2023). *Implementation Of Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) Policy In Business Licensing*. Indonesian Journal of Multidisciplinary Science, 3(2), 188-194. <https://ijoms.internationaljournalallabs.com/index.php/ijoms/issue/view/27>.
- Darmayanti, D., & Lelepadang, E. C. (2020). *Hubungan Peran Sosial Dengan Kualitas Hidup Lansia Di Kelurahan Bakung Kecamatan Biringkanaya Makassar (Doctoral Dissertation, Stik Stella Maris)*. <http://repository.stikstellamarismks.ac.id/533/1/SKRIPS>.
- Djamhari, E. A., Ramdlaningrum, H., Layyinah, A., Chrisnahutama, A., & Prasetya, D. (2021). *Kondisi Kesejahteraan Lansia Dan Perlindungan Sosial Lansia Di Indonesia*. Jakarta : Perkumpulan Prakarsa. <https://repository.theprakarsa>.
- Faisal, M. (2017). *Modal Sosial Usahawan Pendatang di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan*. Jurnal Sosiohumaniora, 19(1), 70-76. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i1.10331>.
- Hamid, H. (2018). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Petani Padi Di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan*. Khazanah ilmu berazam, 1(03), 32-48. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/5673>
- Ife, dan Tesoriero. (2016). *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi*. Pustaka Pelajar.
- Kusworo, K., Prabowo, H., Sinaga, O., & Rumbekwan, M. (2021). *Participatory Planning in Collaborative Governance Perspective in Banyumas Regency, Central Java Province, Indonesia*. The Croatian International Relations Review (CIRR), 27(87), 221-238. <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/779>.
- Labolo, M., Rohmansyah, H., & Rumbekwan, M. (2020). *Political Reforms and the Role of Parliament in Promoting Good Governance through the Integration of Religious Views in National Politics*. Talent Development & Excellence, 12(1), 3324-3330. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/5575>.
- Miles, B. M., Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press
- Murdiyanto, E. (2020). *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal)*. Yogyakarta : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Noor, J. (2011). *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Nuraeni, S., Rachmawati, I., & Nur, T. (2022). *Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Program Sembako Di Kabupaten Sukabumi*. Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik, 9(1), 143–148. <https://doi.org/10.37676/professional.v9i1.2559>
- Pane, M. (2019). *Analisis Sistem Klaim Jaminan Hari Tua Dan Perhitungannya Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan*. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara). <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/6985>
- Putri, D. A. (2019). *Status Psikososial Lansia Di Pstw Abiyoso Pakem Sleman Yogyakarta Tahun 2019* (Doctoral dissertation, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta). <http://poltekkesjogja.ac.id>.
- Rahayu & Vita Putri. (2018). *Peran Dinas Sosial Kota Surabaya Dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (Uptd) Griya Wredha Jambangan Kota Surabaya*. Jurnal Publika, 6(2). <https://doi.org/10.26740/publika.v6n2.p%25p>
- Soekanto, Soerjono. (2002). *Teori Peranan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Umar, F. (2017). *Peran Dinas Sosial Dalam peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia) Terlantar di Kota Bandar Lampung*. Universitas Lampung. <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/28722>.
- Wulandari, A. (2019). *Peran Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dalam Pelayanan Kehidupan Sosial Ekonomi Lanjut Usia*. eJournal Sosiatri-Sosiologi, 7 (4): 116-129. <https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id>.

